

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBERIAN
REMISI KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Analisis Keppres RI No 174 Tahun 1999 tentang Remisi)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Islam Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh

SULASTRY AMIN
NIM. 10300110030

**JURUSAN HUKUM PIDANA DAN KETATANEGARAAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 1 April 2014

Penyusun,

SULASTRY AMIN

NIM: 10300110030

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (*Studi Analisis Keppres RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi*)”**. yang disusun oleh saudari Sulastry Amin , Nim: 10300110030, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari, Rabu tanggal 24 April 2014 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum, dengan beberapa perbaikan.

Samata, 23 April 2014 M
24 Jumadil Akhir 1435 H

DEWAN PENGUJI

| | | | |
|---------------|--------------------------------|---|---|
| Ketua | :Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A. | (|) |
| Sekretaris | :Dra. Nila Sastrawati, M.Si. | (|) |
| Munaqisy I | :Dra. Sohrah, M. Ag. | (|) |
| Munaqisy II | :Dr. Kurniati, M. Hi. | (|) |
| Pembimbing I | :Drs. Hamzah Hasan, M. Hi. | (|) |
| Pembimbing II | :Dra. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd. | (|) |

Diketahui Oleh:

**Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Alauddin
Makassar**

Prof. Dr. H. Ali Parman, MA.
NsIP: 19570414 198503 1 003

MOTTO

“ Tidak selamanya kita harus berjalan , sesekali perlu untuk duduk, kemudian merenung tentang hidup UNTUK MASA DEPAN “

Perhatikanlah sejarahmu untuk hari esok (QS 59 : 18)

[illegible]

Selagi aku berdiri dan bernyawa, aku akan mencoba dan terus berusaha

PERSEMBAHAN

Hari takkan indah tanpa mentari dan rembulan,
begitu juga hidup takkan indah tanpa tujuan,
harapan serta tantangan. Meski terasa berat, namun
manisnya hidup justru akan terasa, apabila semuanya
terlalui dengan baik. Meski harus memerlukan
pengorbanan.

Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup,
yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu
setia mendampingi saat kulemah tak berdaya
(ayah dan ibu tercinta) yang selalu memanjatkan doa
kepada putri tercinta dalam setiap sujudnya. Terima
kasih untuk semuanya.

Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan
impian yang akan dikejar, untuk sebuah
pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna,
karena tragedi terbesar dalam hidup bukanlah
kematian tetapi hidup tanpa tujuan. Teruslah
bermimpi untuk sebuah tujuan, pastinya juga harus
diimbangi dengan tindakan nyata agar mimpi dan
juga angan tidak hanya menjadi sebuah bayangan
semu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sebuah perjalanan hidup selalu memiliki awal dan akhir. Ibarat dunia ini yang memiliki permulaan dan titik akhir. Perjalanan hidup kurang lebih 4 (tahun) begitu terasa dalam sanubari. Setelah melewati perjalanan panjang dan melelahkan, menyita waktu, tenaga, dan pikiran, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini. Oleh karena itu, sembari berserah diri dalam kerendahan hati dan kenistaan diri sebagai seorang hamba, maka sepantasnyalah puji syukur hanya diperuntukan kepada Sang Maha Sutradara, Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan maghfirah-Nya. Kemudian kepada Nabi Muhammad saw., suri tauladan seluruh umat manusia, penyusun kirimkan shalawat dan salam kepada beliau serta para sahabat yang telah memperjuangkan Islam sebagai agama samawi sekaligus sebagai aturan hidup.

Disadari betul bahwa penyusun sebagai bagian dari seluruh makhluk Tuhan yang *zoon politicon* sangat membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, terasa sangat bijaksana bila penyusun menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada sederetan hamba Allah swt. yang telah memberikan sumbangsih baik berupa bimbingan, dorongan, dan bantuan yang mereka berikan kepada penyusun kiranya dicatat oleh Allah swt. sebagai amal saleh. Ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga selesainya penulisan skripsi ini, dan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Muh.Amin B. S,Sos dan Liswati Noor S,Pd, semoga Allah Swt melimpahkan Ridho-Nya dan Kasih-Nya kepada keduanya. Sebagaimana dia mendidik penyusun semenjak kecil, yang atas asuhan, limpahan kasih sayang serta dorongan dari keduanya, penyusun selalu memperoleh kekuatan material dan moril dalam menapaki pencarian hakikat diri.
2. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT., M.S. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
3. Prof. Dr. H. Ali Parman, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
4. Drs. Hamzah Hasan, M. HI dan Dra. Hj. Rahmatiah HL, M. Pd, selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
5. Dra. Sohrah, M. Ag dan Dr. Kurniati, M. Hi, selaku penguji dalam sidang munaqasah skripsi ini.
6. Ibu Dra. Nila Sastrawaty, M.Si selaku ketua dan Alimuddin sekretaris jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah mencurahkan tenaga, pikiran serta bimbingannya dalam memberikan berbagai ilmu pengetahuan dalam mencari secercah cahaya Ilahi dalam sebuah pengetahuan di bangku kuliah.
8. Saudara-saudari senasib seperjuangan jurusan HPK angkatan 2010, Senior-seniorku serta Adik-adikku di jurusan HPK yang tercinta.

9. Ucapan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat HMI, PERMAHI DPC.

Makassar serta kepada teman-teman yang tidak mungkin penyusun sebutkan namanya satu persatu mereka semua telah menjadi inspiratif kepada penyusun secara tidak langsung.

Penyusun juga menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Penyusun berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca yang budiman pada umumnya. Amin.

Makassar, 1 April 2014
Penyusun,

Sulastry. Amin
NIM: 10300110030

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|------|
| JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xii |
| ABSTRAK | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1-17 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Pengertian Judul | 9 |
| D. Kajian Pustaka | 12 |
| E. Metodologi Penelitian | 14 |

| | |
|---|--------------|
| F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 17 |
| BAB II REMISI BAGI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM | |
| KEPPRES RI NO 174 TAHUN 1999 | 18-29 |
| A. Ketentuan tentang Remisi Menurut Keppres RI No 174 tahun | |
| 1999 | 18-23 |
| 1. Pengertian Remisi | 18 |
| 2. Dasar Hukum Pemberian Remisi | 19 |
| 3. Klasifikasi Remisi..... | 20 |
| B. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan menurut Hukum | |
| Nasional | 23 |
| C. Sanksi Pidana menurut Hukum Nasional..... | 24 |
| BAB III REMISI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM | 30-47 |
| A. Pengertian Remisi menurut Hukum Pidana Islam | 30 |
| B. Dasar Hukum dalam Hukum Pidana Islam | 32 |
| C. Remisi Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam | 35 |
| BAB IV ANALISIS PEMBERIAN REMISI TERHADAP PELAKU | |
| TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN | 48-64 |
| A. Tinjauan Umum Keppres RI No 174 tahun 1999 tentang | |
| Remisi | 48 |

| | |
|---|-------|
| B. Klasifikasi dan Syarat Pemberian Remisi bagi Tindak Pidana | |
| Pembunuhan | 53 |
| C. Analisis Hukum Pidana Islam | 59 |
| BAB V PENUTUP | 65-67 |
| A. KESIMPULAN | 65 |
| B. SARAN | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA | 68-70 |
| LAMPIRAN | 71-79 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 80 |

DAFTAR TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf latin sebagai berikut:

| | | | | | |
|-----------|---|-----------|---|----------|---|
| b | : | z | : | f | : |
| t | : | s | : | q | : |
| ts | : | sy | : | k | : |
| j | : | sh | : | l | : |
| h | : | dh | : | m | : |
| kh | : | th | : | n | : |
| d | : | zh | : | w | : |
| dz | : | ' | : | h | : |
| r | : | gh | : | y | : |

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal dan Diftong

- a. Vokal atau bunyi (**a**), (**i**) dan (**u**) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

| Vokal | Pendek | Panjang |
|--------|--------|---------|
| Fathah | a | â |
| Kasrah | i | î |
| Dammah | u | û |

b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (*ay*) dan (*aw*), misalnya:

bayn dan *qawl*.

- 1) *Syahadah* dilambangkan dengan konsonan ganda.
- 2) Kata sandang *al-* (*alif lam ma'rifah*) ditulis dengan huruf kecil, kecuali bila terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (**Al-**) Contohnya: *Al-qur'an*.
- 3) Ta' marbuttha () ditransliterasikan dengan *t*. Tetapi jika ia terletak di akhir huruf *h*. Contohnya: *Fatimah*
- 4) Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Adapun kata atau kalimat yang sudah dibakukan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan *Al-Qur'an*, *sunnah* dan *khusus*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh, misalnya:
اهل البيت (*Ahl Al-Bayt*).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- | | | |
|---------|---|--|
| 1. BPK | = | Badan Pemeriksa Keuangan |
| 2. H. | = | Hijriah |
| 3. HIR | = | <i>Het Hezelane Inland Reglement</i> |
| 4. KUHP | = | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana |
| 5. KUHP | = | Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana |

- | | | |
|--------------------|---|---|
| 6. M. | = | Masehi |
| 7. PBB | = | Perserikatan Bangsa-Bangsa |
| 8. PPATK | = | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan |
| 9. Q.S...(...).... | = | Quran, Surah....., ayat..... |
| 10. ra. | = | Radiyallahu ‘Anhu |
| 11. saw. | = | Salla Allâhu 'Alayhi wa Sallam |
| 12. swt. | = | Subhanahû wata'alâ |

ABSTRAK

Remisi merupakan suatu hak bagi setiap Narapidana, sehingga dari sistem yang berlaku tidak ada yang menghambatnya. Pemberian remisi khusus bagi para Narapidana adalah sebagai bentuk dan perwujudan dari kemajuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang dikaitkan dengan suatu peristiwa keagamaan tertentu. Ketentuan yang mengatur mengenai remisi ada dalam Keppres RI No 174 Tahun 1999. Remisi diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang melakukan tindak pidana salah satunya pelaku tindak pidana pembunuhan, kewenangan pemberi remisi dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Remisi diberikan kepada Anak Pidana maupun Narapidana yang berkelakuan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masalah yang muncul adalah Bagaimana ketentuan remisi yang terdapat dalam Keppres RI No 174 tahun 1999 dan Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap Keppres RI No 174 tahun 1999 terhadap pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana pembunuhan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan mengenai ketentuan remisi yang terdapat dalam Keppres RI No 174 tahun 1999 dan untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap Keppres RI No 174 tahun 1999 terhadap pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* dan *content analisis* karena metode yang dipakai dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data, menyusun, menjelaskan dan menganalisa yang kemudian diinterpretasikan dan disimpulkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dimana data primernya adalah Keppres RI No 174 tahun 1999 dan data sekundernya berupa buku-buku hukum yang diambil dari pendapat atau tulisan para ahli dalam bidang remisi untuk digunakan dalam membuat konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan dianggap sangat penting.

Hasil dari pembahasan ini pada dasarnya pemberian remisi pembunuhan menurut Keppres RI No 174 tahun 1999 ini diberikan kepada pelaku setelah ia mendapatkan putusan atau dengan kata lain setelah ia melaksanakan hukumannya, remisi penyusun kategorikan sebagai mashlahah mursalah karena perbedaan remisi dengan pengampunan dalam jarimah *kisas diat*. Pengampunan dalam jarimah *kisas* dan *diat* menyerahkan hukuman kepada pihak ahli waris korban meskipun tetap dalam pengawasan ulil amri sedangkan remisi dari pihak korban tidak mempunyai kewenangan menjatuhkan hukuman karena sudah ada hakim yang menjalankan proses peradilanannya. Selain itu, secara tidak langsung putusan hakim yang mempunyai ketetapan hukum dapat berubah dengan adanya pengurangan hukuman, tentu dirasa kurang adil bagi pihak korban yang nyata-nyata telah kehilangan nyawa keluarganya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*), hal tersebut ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen. Hal ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, dan menjamin semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan Negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana.¹

¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2003), h. 6.

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan).² Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dipakai untuk menghadapi ancaman-ancaman dan bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu etika merupakan pengancaman yang utama dan kebebasan manusia.

Sedangkan di dalam Islam, hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah* yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan Hadis.³

Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan. Pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim haruslah mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat yang patuh terhadap hukum berarti mencintai keadilan.⁴

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2004), h. 167.

³ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 1.

⁴ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, h. 11.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun di dalam hukum pidana Islam, tindak pidana mempunyai macam-macam bentuknya, ancaman hukuman yang diberikanpun berbeda antar satu tindak pidana, baik dari pidana yang paling ringan maupun yang terberat sekalipun, Salah satu contohnya adalah tindak pidana pembunuhan.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hukuman bagi tindak pidana pembunuhanpun berbeda antara pasal satu dengan pasal yang lain, seperti halnya dalam Pasal 338 KUHP disebutkan “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara”,⁵ tetapi akan berbeda pula hukumannya jika pembunuhan itu didahului dengan perencanaan seperti dalam Pasal 339 yang diancam dengan hukuman seumur hidup.

Dalam hukum pidana nasional di Indonesia, jenis-jenis sanksi yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam Pasal 10 KUHP yaitu:

1. Hukuman pokok, yang terdiri dan: hukuman mati, hukuman pidana, hukuman kurungan, dan hukuman denda.
2. Hukuman-hukuman tambahan, yang terdiri dan : pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.⁶

⁵ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 134.

⁶ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: CV, Mandar Maju, 1997), h.186.

Sedangkan di dalam hukum pidana Islam jenis hukuman dibedakan menjadi dua yaitu (a) ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk *kisas* dan *diat* yang tercantum didalam al-Qur'an dan hadis. Hal dimaksud adalah *hudud*, (b) ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusannya yang disebut hukuman *takzir*. *Jarimah Hudud* adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw. Sedangkan *Jarimah Takzir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya.⁷ Pembunuhan termasuk jarimah atau tindak pidana yang diancam hukuman *kisas*.

Di dalam hukum pidana Islam pembunuhan dikelompokkan menjadi tiga yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja, dan pembunuhan semi sengaja. Hukum pidana Islam menjatuhkan sanksi pidana yang sangat berat bagi pelaku pembunuhan yang disengaja yaitu dengan tindakan hukuman pidana mati atau hukuman *Kisas*. Namun, pelaksanaan hukuman itu diserahkan pada putusan keluarga si terbunuh, pilihannya apakah tetap dilaksanakan hukuman *Kisas* atau dimaafkan dengan penggantian berupa *diat* atau denda sebesar yang ditetapkan oleh keluarga si terbunuh. Meskipun keputusan diserahkan kepada keluarga si terbunuh, tapi adanya

⁷ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, h.11.

hukuman *Kisas* ini ternyata efektif untuk meminimalisir terjadinya pembunuhan nyawa orang yang tidak bersalah.⁸

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah / 2 : 178



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *Kisas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”⁹

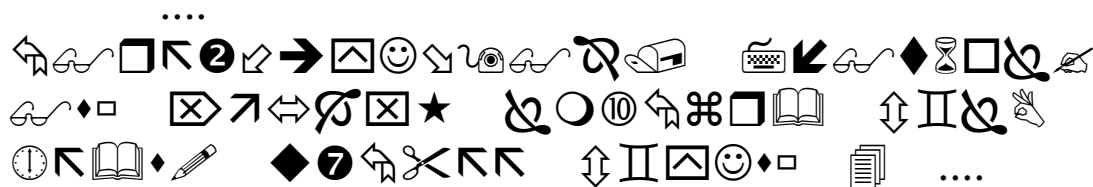
Kisas ialah mengambil pembalasan yang sama. *Kisas* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat pemaafan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan

⁸ Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam Di Indonesia Peluang, Prospek, Dan Tantangan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 88.

⁹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: LUBUK AGUNG BANDUNG, 1989), h. 43.

membayar *diat* (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran diyat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguk-nanggukannya. Bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima *diat*, maka terhadapnya di dunia diambil *kisas* dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih. Jadi *Kisas* itu berarti memperlakukan seseorang sebagaimana orang itu memperlakukan orang lain.

Hukum pidana Islam juga mengenal dengan adanya gugurnya hukuman karena sebab tertentu. Gugurnya hukuman disini adalah tidak dapat dilaksanakannya hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan atau diputuskan oleh hakim, berhubung tempat (badan atau bagiannya) untuk melaksanakan hukuman sudah tidak ada lagi, atau waktu untuk melaksanakannya sudah lewat. Adapun sebab-sebab gugurnya hukuman tersebut salah satunya adalah adanya pengampunan.¹⁰ Kasus pembunuhan pun, hukum Islam mengenal asas pemaafan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah swt. dalam penggalan QS al-Baqarah / 2 : 178



Terjemahnya:

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 173.

“Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik,”¹¹

Pelaksanaan pidana mati dalam sejarah hukum pidana di Indonesia masih sangat jarang terjadi, dengan alasan kemanusiaan hukuman mati sering digantikan dengan hukuman penjara. Hukuman penjara adalah suatu tempat yang khusus dibuat dan digunakan para terdakwa dalam menjalankan hukumannya sesuai putusan hakim.¹² Pidana penjara atau pidana lain yang menghilangkan kemerdekaan bergerak seseorang, pada akhir tujuannya adalah melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan, jadi apabila negara tidak memberikan hukuman yang tidak setimpal kepada pelaku kejahatan maka negara telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Tetapi, apakah demikian yang terjadi di dalam masyarakat, karena dengan berjalannya masa hukuman, Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM setiap tahun ketika hari-hari besar kenegaraan dan hari besar agama memberikan suatu pengurangan masa tahanan atau yang sering disebut dengan Remisi. Pengertian remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.¹³ Sedangkan remisi menurut Keppres RI No 174 tahun 1999 adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada setiap narapidana bila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidananya.¹⁴ Dengan demikian maka narapidana tidak akan

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 43.

¹² Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, h. 188.

¹³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 503.

¹⁴ Keppres RI No 174 tahun 1999 pasal 1

menjalankan hukuman yang diberikan secara penuh sehingga dengan adanya remisi ini apakah akan membuat jera bagi pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi atau menjadi residifis.

KUHP dalam penerapannya sudah mulai disesuaikan dengan prinsip keadilan bagi masyarakat Indonesia, tetapi mengapa putusan seorang hakim yang mempunyai putusan tetap dapat berubah dan berkurang dengan adanya remisi ini. Padahal pemberian remisi ini tidak melihat dari jenis tindak pidana yang dilakukan. Akan tetapi, hanya pada lamanya masa tahanan yang akan dijalani dan berperilaku baik selama menjalani hukuman. Seperti pada tindak pidana pembunuhan sekalipun yang tetap mendapat remisi, padahal tindak pidana pembunuhan ini telah nyata merampas hak hidup orang lain. Tentu muncul pertanyaan adilkah remisi ini dilihat dari pihak korban? Tentu ini menjadi persoalan yang tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang semata.

Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik minat untuk mengetahui bagaimana remisi itu diberikan mengingat hanya narapidana yang mempunyai syarat-syarat tertentu saja yang bisa mendapatkan remisi itu lebih-lebih untuk kasus seperti pembunuhan. Selain itu, merasa tertarik untuk mengetahui remisi itu ditinjau dari sudut pandang atau perspektif hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah), kemudian mencoba menganalisis dalam bentuk karya ilmiah yang disusun dalam bentuk skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan ketentuan remisi yang terdapat dalam Keppres RI No 174 tahun 1999 bagi pelaku tindak pidana pembunuhan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap Keppres RI No 174 tahun 1999 terhadap pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana pembunuhan ?

C. Pengertian Judul

1. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukalaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan Hadis.¹⁵ Tindakan kriminal dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis.¹⁶

2. Remisi

¹⁵ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), h. 86.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, h. 1.

Kata remisi berasal dari bahasa Inggris yaitu *remission*. *Re* yang berarti kembali dan *mission* yang berarti mengirim, mengutus. Remisi diartikan pengampunan atau pengurangan hukuman. Dari pengertian tersebut, Remisi merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa asing yang kemudian digunakan dalam pengistilahan hukum di Indonesia. Sebagaimana Remisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum.¹⁷ Selain itu menurut kamus hukum karya Soedarsono, remisi mempunyai arti pengampunan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi hukuman pidana.¹⁸

3. Tindak Pidana

Kata-kata tindak pidana, perbuatan pidana atau delik identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum pidana Islam sebagai *jarimah*. Yang dimaksud dengan kata-kata *jarimah* ialah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah swt. dengan hukuman *had* atau *takzir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.¹⁹

Jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal atau harta

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 945.

¹⁸ Soedarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rhineka Cipta, 1992), h. 402.

¹⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 1.

benda. Kata jinayah berasal dari kata *janayajni* yang berarti *akhaza* (mengambil) atau sering pula diartikan kejahatan, pidana atau kriminal.

4. Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan termasuk dalam kategori jarimah *Kisas* dan *diyat*. Dalam bahasa arab, pembunuhan disebut () yang sinonimnya () artinya mematikan. Para ulama mempunyai definisi yang berbeda-beda walaupun kesimpulannya sama yaitu tentang menghilangkan nyawa orang lain. Berbagai ulama' yang mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Yang pertama adalah didefinisikan oleh Wahbah az-Zuhayliy yang mengutip pendapat Khatib Syarbini sebagai berikut "Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang", Selain itu Abdul Qadir al-Audah menerangkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan, yang berarti menghilangkan jiwa anak adam oleh perbuatan anak adam yang lain.²⁰ Sedangkan menurut Ahmad Wardi Muslich definisi pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja,²¹ Pengertian *jarimah* pembunuhan menurut Zainudin Ali dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Islam*

²⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam/Editor* (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), h. 177.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika. 2005), h.137.

adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan atau beberapa orang meninggal dunia.²² Jadi, banyak sekali pengertian-pengertian yang dapat ditarik kesimpulan bahwa pembunuhan itu merupakan aktifitas menghilangkan nyawa orang lain yang dapat dilihat dari berbagai aspek tinjauan hukum.

D. *Kajian Pustaka*

Dalam kajian pustaka ini, akan memaparkan tentang beberapa sumber yang membicarakan masalah tersebut di antaranya :

Andi Hamzah, dalam bukunya *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Edisi Revisi) yang menjelaskan tentang pengertian, ruang lingkup, serta proses beracara dalam hukum pidana. Buku ini menjelaskan tentang hukum acara pidana yang telah dikodifikasikan dalam KUHAP sehingga sangat membantu dalam menguraikan proses demi proses dalam alur pembuktian hukum acara pidana.

Moeljatno, dalam bukunya *Asas–Asas Hukum Pidana*, karyanya ini membahas tentang apa hukum pidana itu, asas asas hukum pidana, ilmu hukum pidana , unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana sampai dengan pertanggung jawaban hukum pidana. Namun sebelum itu sedikit saya jelaskan tentang hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

²² Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, h. 24.

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan dan dijatuhi pidana sebagai yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Zainuddin Ali, dalam bukunya *Hukum Pidana Islam*. Karyanya ini menjelaskan hukum pidana Islam, asas-asas, sumber-sumber sampai dengan konsep hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukalaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan Hadis.²³ Tindakan kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis.

Ahmad Wardi, dalam bukunya *Hukum Pidana Islam*, buku ini membahas substansi hukum pidana Islam sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah swt. dan

²³ Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, h. 86.

Rasul-Nya. Buku ini menyajikan dengan jelas mengenai pengantar asas hukum pidana Islam.

R. Soesilo, dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, buku ini merupakan salah satu panduan terlengkap yang dalam pegangan saya karena dalam buku ini memaparkan semua pasal-pasal dan setiap pasal langsung dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan dari sudut pandang penyusun dan pendapat-pendapat para ahli hukum Indonesia.

Berdasarkan kajian tersebut jelas membedakan dengan penelitian yang dibuat. Hal ini nampak jelas dari permasalahan yang diangkat. Penyusun dalam tulisan ini mengangkat pemberian remisi terhadap suatu tindak pidana pembunuhan. Sehingga penelitian tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi) diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan baru terutama di bidang ilmu hukum pada umumnya.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang juga sering disebut dengan penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a) Pendekatan Yuridis

Suatu metode penelitian yang menekankan pada suatu penelitian dengan melihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang- Undang yang terkait tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. Dalam metode ini senantiasa berpedoman pada peraturan-peraturan yang masih berlaku.

b) Pendekatan Sosiologis

Sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan konsep dan kaedah-kaedah yang terdapat dalam ilmu sosiologi. Dalam Pendekatan metode ini yaitu melihat dari kejadian-kejadian yang muncul dalam masyarakat seperti pemberitaan-pemberitaan oleh media massa tentang kejahatan.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan bahan-bahan yang diperoleh berdasarkan dari data-data primer dan sekunder.

- a) Data Primer : Keppres RI nomor 174 tahun 1999. sebagai data pokok yang dianalisis dalam skripsi ini.

- b) Data Sekunder : berupa buku-buku atau bahan-bahan hukum yang diambil dari pendapat atau tulisan-tulisan para ahli dalam bidang remisi untuk digunakan dalam membuat konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan dianggap sangat penting.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a) Tehnik Pengolahan Data

(1) *Identifikasi Data* yaitu dengan mengumpulkan beberapa literatur, kemudian memilah-milah dan memisahkan data yang akan dibahas.

(2) *Editing data* adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui *relevansi* (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan.

b) Analisis Data

Adapun untuk menganalisis data, penulis menggunakan *deskriptif analisis*, karena sebagian sumber data dari penelitian ini berupa informasi dan berupa teks dokumen. Maka penyusun dalam menganalisis menggunakan teknik analisis dokumen yang sering disebut *content analisis*. Disamping itu data yang dipakai adalah data

yang bersifat deskriptif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dan analisis data yang dipergunakan dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder.

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah :

- a) Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai ketentuan remisi yang terdapat dalam Keppres RI No 174 tahun 1999.
- b) Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap Keppres RI No 174 tahun 1999 terhadap pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana pembunuhan.

2. Manfaat

Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan hasil penelitian ini akan memperoleh manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan ilmu pengetahuan baru mengenai pemberian remisi baik dari sudut pandang hukum pidana Islam maupun hukum pidana di Indonesia.

- b) Menjadikan sumber inspirasi dalam rangka memberikan kontribusi ilmiah mengenai masalah pemberian remisi, sejalan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Dan memperkaya ilmu pengetahuan khususnya mengenai masalah remisi bagi masyarakat awam umumnya yang kurang begitu jelas tentang pemberian remisi.

BAB II

REMISI BAGI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KEPPRES RI NO 174 TAHUN 1999

A. Ketentuan tentang Remisi Menurut Keppres RI No 174 Tahun 1999

1. Pengertian Remisi

Pengertian Remisi memang tidak hanya terpaku dalam satu pengertian saja. Banyak pengertian yang diberikan oleh para ahli maupun yang sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian remisi, hanya mengatakan bahwa: “setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”¹

Remisi menurut Kamus Hukum karya Soedarsono SH memberikan pengertian bahwa remisi adalah pengampunan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi hukuman pidana.² Sedangkan Menurut Andi Hamzah, remisi adalah pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.³ Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6, pengertian remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada

¹ Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 Pasal 1 tentang *Remisi*.

² Soedarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rhineka Cipta, 1992), h.402.

³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h.503.

narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.⁴ Sedangkan menurut mantan Dirjen Pemasyarakatan Mardjaman, pemberian remisi merupakan salah satu motivasi bagi narapidana untuk membina diri agar kelak dapat kembali kemasyarakat melalui reintegrasi yang sehat.⁵

Dari beberapa penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian remisi diartikan sebagai pengurangan hukuman terhadap narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik dengan tujuan untuk memotivasi narapidana yang bersangkutan dan narapidana yang lain untuk berbuat baik dan segera menjalani kehidupan di masyarakat.

2. Dasar Hukum Pemberian Remisi

Dasar hukum pemberian remisi terhadap narapidana dan anak pidana antara lain sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- b. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- c. Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

⁴ Peraturan Presiden RI No. 32 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (6) tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.

⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 143.

- e. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999.
- f. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.04-HN.04.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan anak pidana.
- g. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No. M.10 HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 Tentang Remisi Susulan.
- i. Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor PASW.86.OT.03.01 Tahun 2008 Tentang Klasifikasi Kasus-kasus Tertentu Terkait PP Nomor 28 Tahun 2006.
- j. Surat Edaran No. E.PS.01-03-15 tanggal 26 Mei 2000 tentang Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara.

1. Klasifikasi Remisi

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa, “setiap Narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.⁶ Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa: “setiap Narapidana dan

⁶ Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang *Remisi*.

anak pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi”.⁷

Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, terdapat jenis-jenis atau bentuk-bentuk remisi, yaitu remisi umum, remisi khusus, remisi tambahan. Adapun penjelasan remisi tersebut sebagai berikut:

- a. Remisi umum, adalah remisi yang diberikan pada Hari Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Besarnya remisi umum adalah:
 - 1) 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan ; dan
 - 2) 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
- b. Remisi khusus, adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan anak pidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia No.M.09.HN.02.01 Tahun 1999,

⁷ Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang *Syarat dan Tata Acara Hak Warga Binaan Permayarakatan*.

Pasal 3 ayat (2) dinyatakan, bahwa pemberian Remisi Khusus dilaksanakan pada.⁸ :

- 1) Setiap Hari Raya Idul Fitri bagi Narapidana dan anak pidana yang beragama Islam;
- 2) Setiap Hari Natal bagi Narapidana dan anak pidana yang beragama Kristen;
- 3) Setiap Hari Raya Nyepi bagi Narapidana dan anak pidana yang beragama Hindu.

c. Remisi Tambahan, adalah remisi yang diberikan apabila Narapidana dan anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:

- 1) Berbuat jasa kepada Negara;
- 2) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan; atau
- 3) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas.

Ketentuan remisinya terdapat pada pasal 9 ayat 1 sampai 4 Keppres RI No 174 Tahun 1999, yaitu :

- (1) Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

⁸ Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keppres No. 174 tahun 1999 tentang remisi.

- (3) Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan oleh Narapidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

B. Pengertian tindak pidana Pembunuhan Menurut Hukum Positif

Kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa, membunuh artinya membuat seseorang mati, pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Perbuatan yang dikatakan pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.⁹ Pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh; perbuatan (hal,dsb) membunuh.¹⁰ Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.¹¹ Pembunuhan adalah perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, di mana perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang telah diatur dalam ketentuan yang ada dalam KUHP.

Jadi tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu delik materil yang artinya delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya

⁹ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia* (Bandung : Alumni 1992), h. 129.

¹⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. 5. (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), h.169.

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus*, cet. 1, (Bandung: Bina Cipta, 1986), h. 1.

dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.¹² Unsur-unsur pembunuhan adalah :

- a. Barang siapa: ada orang tertentu yang melakukan.
- b. Dengan sengaja : dalam ilmu pidana di kenal tiga jenis bentuk sengaja,yaitu:
 - 1) Sengaja sebagai maksud.
 - 2) Sengaja dengan keinsafan.
 - 3) Menghilangkan nyawa orang lain.¹³

C. Sanksi Pidana Menurut Hukum Nasional.

Dalam perilaku sosial, tindak kejahatan merupakan perilaku menyimpang, yaitu tingkah laku yang melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan pengertian normatif atau dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. Dan salah satu cara untuk mengendalikan adalah dengan sanksi pidana.

Hakekat dari sanksi pidana adalah pembalasan, sedangkan tujuan sanksi pidana adalah penjeratan baik ditujukan pada pelanggar hukum itu sendiri maupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat. Selain itu, juga bertujuan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan pendidikan atau perbaikan bagi para penjahat.

Di dalam KUHP, pidana-pidana yang ditentukan ada dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Sistem hukuman yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP

¹² P.A.F Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 2.

¹³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh* (Jakarta: Grafika.2007), h. 22.

menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana terdiri dari :

1. Hukuman Pokok (*hoofdstraffen*).

a. Pidana mati.

Pidana ini merupakan pidana yang paling berat menurut hukum nasional di Indonesia. Bagi kebanyakan Negara, masalah pidana mati hanya mempunyai arti dari sudut kultur historis. Dikatakan demikian karena, kebanyakan banyak negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi dalam Kitab Undang-undangnya. Sehingga hal ini, masih menjadi masalah.

b. Pidana penjara.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penjara berarti bangunan tempat mengurung orang hukuman. Pidana penjara adalah salah satu jenis pidana pokok yang terdapat dalam KUHP yang berlaku sekarang (*Ius Constitutum*) dan RUU KUHP mendatang (*Ius Constituendum*). Menurut P.A.F. Lamintang pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga permasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga permasyarakatan. Yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.¹⁴

Sementara dalam KUHP, pengertian pidana penjara tidak dijelaskan secara mendetail. Namun dalam pasal 12 ayat (1) KUHP, hanya diterangkan bahwa pidana

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1988), h. 69.

penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman hukuman mati. Jadi pada umumnya pidana penjara maksimum adalah lima belas tahun.

c. Pidana kurungan.

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.

Menurut KUHP pasal 18 ayat (1) dikatakan bahwa pidana kurungan itu minimal 1 hari maksimal 1 tahun; dan dalam hal gabungan kejahatan, *residive* (pengulangan kejahatan); ketentuan yang terdapat dalam pasal 18 ayat (2) KUHP.

Dalam hal pidana kurungan tidak dapat dipekerjakan di luar daerah dimana ia bertempat tinggal dan berdiam waktu pidana itu dijatuhkan. Pidana kurungan dapat sebagai pengganti pidana denda, jika seseorang tersebut tidak dapat atau tidak mampu membayar denda yang harus dibayar, dalam hal perkaranya tidak begitu berat.¹⁵

d. Pidana denda.

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik yang ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan yang ringan. Oleh karena itu, pidana denda merupakan satu-satunya yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Meskipun denda yang dijatuhkan

¹⁵ Ninik Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Pidana dan Pemidanaan*, ed. Ke-I (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), cet. Ke-II, h.23-24.

terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

- e. Pidana tutupan (berdasarkan Undang-undang RI No. 20 Tahun 1946 Berita Negara RI tahun kedua No. 24 tanggal 1 dan 15 November 1946).¹⁶

Pidana tutupan itu sebenarnya sudah dimasukkan oleh pembentuk Undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari suatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.¹⁷

2. Hukuman Tambahan (*bijkomende straffen*)

- a. Pencabutan beberapa hak tertentu.

Dalam pasal 35 KUHP telah ditentukan pembolehan pencabutan hak-hak tertentu si bersalah dengan keputusan hakim, yakni antara lain:

- 1) Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam kitab Undang-undang ini atau kitab Undang-undang umum lainnya, ialah:
 - (a) Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu ;
 - (b) Masuk balai tentara;
 - (c) Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena Undang-undang umum;

¹⁶ Rudy T. Erwin dan J.T.Prasetyo, *Himpunan Undang-undang dan Peraturan-peraturan Hukum Pidana*, Jilid I, (Jakarta: Aksara Baru, 1980), h. 236-238.

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier di Indonesia* (Bandung: Armico, 1984), h. 147.

- (d) Menjadi penasehat atau wali, atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri;
- (e) Kekuasaan bapak, perwalian, pengampuan atas anaknya sendiri;
- (f) Melakukan pekerjaan tertentu.

2) Hakim berkuasa memecat seorang pegawai negeri dari jabatannya apabila dalam Undang-undang umum ada ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa melakukan pemecatan itu.

b. Perampasan barang-barang tertentu.

Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam pasal 39 KUHP yang berbunyi:

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk kejahatan, dapat dirampas;
- 2) Dalam hal pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan disengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti di atas, tetapi hanya dalam hal-hal yang ditentukan dalam Undang-undang.
- 3) Perampasan dapat juga dilakukan terhadap orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada Pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.¹⁸

¹⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta; PT Bumi Aksara, 2007), h. 20.

c. Pengumuman putusan Hakim.

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumunkan khayalak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum, Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atau biaya si terhukum. Jadi cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan (pasal 43 KUHP),¹⁹

¹⁹ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktek, Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) Cet. Ke-III, h. 111-112.

BAB III

REMISI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Remisi Menurut Hukum Pidana Islam

1. Menurut Terminologi

Kata remisi merupakan serapan dari bahasa asing yaitu *remission* yang berarti pengampunan.¹ Sebagaimana Remisi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengurangan jumlah atau lama hukuman yang diberikan kepada orang yang dihukum.² Selain itu menurut kamus hukum karya Soedarsono, remisi mempunyai arti pengampunan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi hukuman pidana.³

2. Menurut Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan PP RI No 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.⁴ Sedangkan aturan yang membahas khusus masalah remisi yaitu Keppres RI No 174 Tahun 1999, tidak memberikan pengertian remisi secara jelas, hanya menegaskan dalam pasal 1 “Setiap

¹ Andreas Halim, *Kamus Lengkap 10 Milyar* (Surabaya: Sulita Jaya, 1999), h.277.

² Tim media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Media Center, 2012), h.453.

³ Soedarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rhineka Cipta, 1992), h. 402.

⁴ Presiden RI, *Peraturan Pemerintah RI No 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, pasal 1

narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”.⁵ Yang dimaksud berkelakuan baik ialah narapidana yang menaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi.

3. Menurut Pendapat Ahli

Andi hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus 1945.⁶

Dalam istilah Arab memang tidak dijumpai pengertian yang pasti mengenai kata remisi, tetapi ada beberapa istilah yang hampir sepadan dengan makna remisi itu sendiri, yaitu *al-Afu'* (maaf, ampunan), *ghafar* (ampunan), *rukhsah* (keringanan), *syafa'at* (pertolongan), *tahfif* (pengurangan). Selain itu menurut Sayid Sabiq memaafkan disebut juga dengan *Al-Qawdu'* “menggiring” atau memaafkan yang ada halnya dengan *diyat* atau *rekonsiliasi* tanpa *diyat* walau melebihinya.⁷

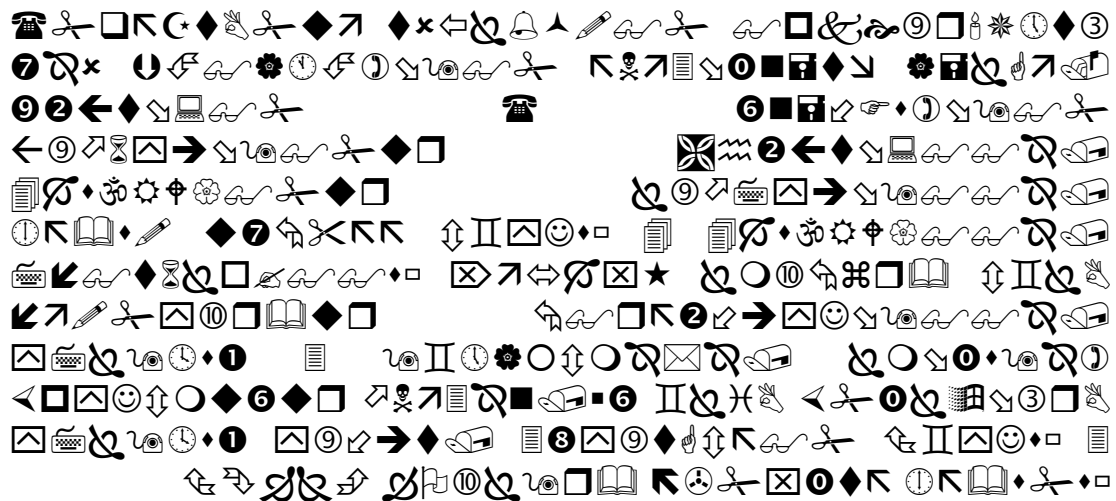
⁵ Presiden RI, Kepres RI No 174 Tahun 1999 pasal 1

⁶ Dwidga priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 133.

⁷ Sayyid Sabiq (ed.), *Fiqih Sunah*, Diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin Dari “Fiqhus Sunah” (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), h. 419.

B. Dasar Hukum Remisi dalam Hukum Pidana Islam

Dasar pengampunan hukuman yang menjadi hak korban/walinya terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dasar dari Al-Qur'an adalah firman Allah swt dalam QS al-Baqarah/ 2 : 178



Terjemahnya:

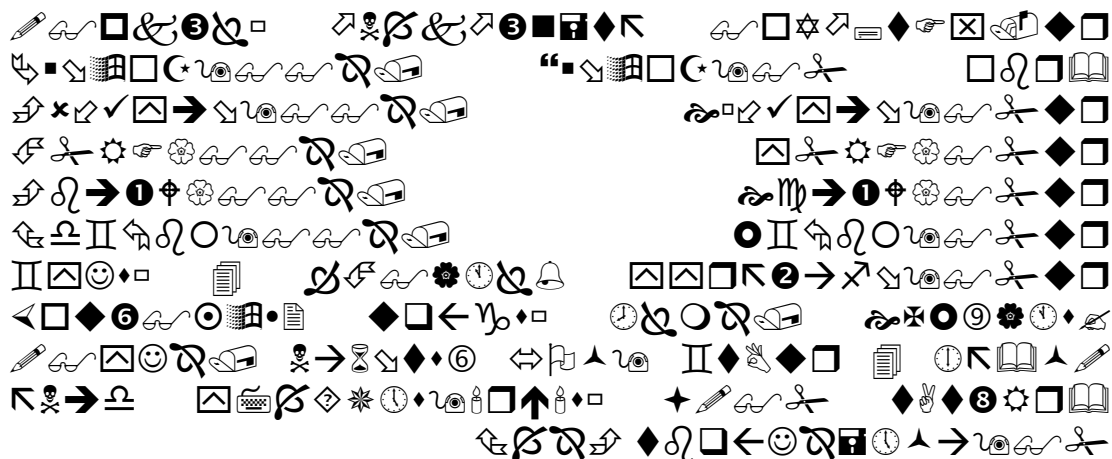
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.⁸

Adapun sebab diturunkannya ayat ini adalah riwayat yang berasal dari Qatadah yang menceritakan bahwa penduduk jahiliyah suka melakukan penganiayaan dan tunduk kepada setan. Jika terjadi permusuhan di antara mereka maka budak

⁸ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: LUBUK AGUNG BANDUNG, 1989), h.43.

mereka akan membunuh budak orang yang dimusuhinya. Mereka juga sering mengatakan , “kami hanya akan membunuh orang merdeka sebagai ganti dari budak itu”. Sebagai ungkapan bahwa mereka lebih mulia dari suku lain. Seandainya seorang wanita dari mereka membunuh wanita lainnya, merekapun berkata, “kami hanya akan membunuh seorang lelaki sebagai ganti wanita tersebut”, maka Allah menurunkan firman-Nya yang berbunyi ”*Orang merdeka dengan orang merdeka , hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.*”⁹

Selain mewajibkan *kisas*, Islam juga lebih menganjurkan pemberian maaf, dan mengatur tata cara (hududnya), sehingga sikap pemberian maaf ini terasa sangat adil dan muncul setelah penetapan *kisas*. Anjuran pemberian maaf ini bertujuan untuk mencapai kemuliaan , bukan suatu keharusan, sehingga bertentangan dengan naluri manusia dan membebani manusia dengan hal-hal di luar kemampuan mereka. Selain itu terdapat juga dalam QS al-Maaidah/ 5 : 45



Terjemahnya:

⁹ Abdurrahman Kasdi Dan Umma Farida , *Tafsir Ayat-Ayat Yaa Ayyuhal-Ladziina Aamanuu* (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2005), h. 63.

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.¹⁰

Ayat ini menekankan bahwa ketetapan hukum *diat* tersebut ditetapkan kepada mereka mereka Bani Isra'il di dalam kitab Taurat. Penekanan ini disamping bertujuan membuktikan betapa mereka melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam kitab suci mereka, juga untuk menekankan bahwa prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh al-Qur'an ini pada hakekatnya serupa dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan Allah swt. terhadap umat-umat yang lalu. Dengan demikian diharapkan ketentuan hukum tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua umat termasuk umat Islam.¹¹

Penafsiran dalam penutupan ayat ini, ” *Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim*” mengesankan bahwa anjuran memberi maaf bukan berarti melecehkan hukum *kisas* karena hukum ini mengandung tujuan yang sangat agung, antara lain menghalangi siapapun melakukan penganiayaan, mengobati hati yang teraniaya atau keluarganya, menghalangi adanya balas dendam dan lain-lain. Sehingga jika hukum ini dilecehkan maka kemaslahatan itu tidak akan tercapai dan ketika itu dapat terjadi kezaliman. Oleh sebab itu, putuskanlah perkara sesuai dengan yang diperintahkan

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.167.

¹¹ M. Quraishi Shihab, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 107.

oleh Allah, memberi maaf atau melaksanakan *kisas*. Karena barang siapa yang tidak melaksanakan hal tersebut yakni tidak memberi maaf atau tidak menegakkan pembalasan yang seimbang, maka dia termasuk orang yang zalim.

C. Remisi Pembunuhan dalam Hukum Islam

Pembunuhan secara etimologi, merupakan bentuk masdar , dari fi'il madhi yang artinya membunuh.¹² Adapun secara terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu perbuatan mematikan; atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan. Sedangkan menurut Abdul Qadir 'Audah, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa; menghilangkan ruh atau jiwa orang lain.

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam *jarimah kisas* (tindakan pidana yang bersanksikan hukum *kisas*), yaitu tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa menderita musibah dalam bentuk hilangnya nyawa, atau terpotong organ tubuhnya.¹³ Jadi, banyak sekali pengertian-pengertian yang dapat ditarik kesimpulan bahwa pembunuhan itu merupakan aktifitas menghilangkan

¹² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1992), h. 172.

¹³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. Ke-2 (Kairo: Dar ad-Diyan li at-Turas, 1990), II: 263.

nyawa orang lain yang dapat dilihat dari berbagai aspek tinjauan hukum. Dilihat dari segi sifat perbuatannya pembunuhan dapat dibagi lagi menjadi tiga.¹⁴ yaitu :

a. Pembunuhan Sengaja (*amd*).

Pembunuhan sengaja (*amd*) adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang mukalaf terhadap seseorang yang darahnya dilindungi, dengan memakai alat yang pada kebiasaan alat tersebut dapat membuat orang mati. Dalam ajaran Islam, pembunuhan yang dilakukan dengan disengaja terhadap orang-orang yang dilindungi jiwanya, dianggap sebagai suatu *jarimah* dan juga dosa besar (*akbaul kaba'ir*). Hukuman *jarimah* ini apabila memenuhi persyaratan dan semua unsur-unsur adalah dibunuh kembali. Adapun unsur-unsur pembunuhan disengaja ada tiga yaitu:

- 1) Orang yang dibunuh adalah manusia hidup, maksudnya ketika seseorang membunuh, si terbunuh dalam keadaan hidup. Kerelaan orang yang dibunuh, misalkan karena penyakit yang tak kunjung sembuh dan menyebabkan keputusan (*mercy killing* atau *euthanasia*), tidak mengurangi hukuman bagi si pelaku. Karena kerelaan untuk dibunuh bukan termasuk kebolehan untuk melakukan pembunuhan, dan bukan hal yang dibenarkan oleh syara'. Oleh sebab itu, ada ulama yang menetapkan sanksi dari perbuatan ini adalah *kisas*.
- 2) Kematian korban merupakan hasil dari perbuatan si pembunuh. Misalkan dengan menggunakan alat-alat yang lazim digunakan untuk membunuh.

¹⁴ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, h. 24

3) Adanya niat, karena apabila tidak ada niat, pastinya pelaku tidak akan menyiapkan dan menggunakan alat yang lazim digunakan untuk membunuh.

Dan syarat-syarat pembunuhan dikategorikan sengaja adalah:¹⁵

- (a) Pembunuh adalah orang yang berakal, baligh, dan sengaja membunuh.
- (b) Si terbunuh hendaklah manusia yang darahnya dilindungi.
- (c) Alat yang digunakan membunuh adalah alat yang pada kebiasaannya dapat mematikan.

b. Pembunuhan Tidak Disengaja (*khata*).

Menurut Sayyid Sabiq, pembunuhan tidak disengaja ketidaksengajaan dalam dua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Pembunuhan ini disebut juga pembunuhan karena kesalahan. Contohnya, ketika seseorang yang membidik binatang buruan, kemudian salah sasaran dan terkena kepada manusia yang darahnya dilindungi. Adapun unsur-unsur pembunuhan tidak disengaja adalah:

- 1) Perbuatan ini tidak disengaja atau tidak diniati.
- 2) Kematian yang ditimbulkan tidak dikehendaki si pelaku.
- 3) Adanya keterkaitan kausalitas antara perbuatan dan kematian.

c. Pembunuhan Semi Sengaja (*syibu al-Amd*).

Pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik. Sebagai contoh: seorang guru memukulkan penggaris kepada kaki seorang muridnya, tiba-tiba muridnya yang

¹⁵ Sayyid Sabiq, Ter. Nor Hasanuddin, dkk, Fiqhus Sunnah, Cet. ke-1 (Jakarta: Pena Budi Aksara, 2006), Jilid III, h. 411.

dipukul itu meninggal dunia, maka perbuatan guru tersebut dinyatakan sebagai pembunuhan semi sengaja (*syibhu al-amdi*).¹⁶

Dalam suatu tindakan pasti memiliki dampak ,tindakan menghilangkan nywa orang lain maupun diri sendiri memiliki konsekuensi berupa hukuman baik berupa hukuman di dunia maupun di akhirat.

Dalam Islam remisi biasa juga disebut pengampunan. Pengampunan bagi tindak pelaku pembunuhan merupakan hak dari wali korban. Wali diberi wewenang untuk mengampuni hukuman kisas. Apabila ia memaafkan maka gugurlah hukuman kisas tersebut. Dalam hal pemberian ampunan bisa saja dari ahli waris korban memberikan dengan cuma-cuma atau dengan meminta *diat*. Tetapi meskipun demikian tidaklah menjadi penghalang bagi penguasa untuk menjatuhkan hukuman takzir yang sesuai terhadap pelaku.

Wali korban boleh memaafkan secara cuma-cuma dan inilah yang lebih utama, oleh karena Allah swt. telah berfirman dalam surat al-Baqarah/ 2 : 237



Terjemahnya:

“Dan pema’afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.”¹⁷

¹⁶ Zainuddin ali, *Hukum Pidana Islam*, h.24.

¹⁷ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: LUBUK AGUNG BANDUNG,1989), h. 39.

Menurut madzab syafi'i dan madzab hambali, pengampunan dari *kisas* mempunyai pengertian ganda, yaitu pengampunan dari *kisas* saja atau pengampunan dari *kisas* dan diganti dengan *diat*. Kedua pengertian tersebut merupakan pembebasan hukuman dari pihak korban tanpa menunggu persetujuan dari pihak pelaku.¹⁸ Sedangkan menurut imam malik dan abu hanifah, pengampunan itu hanya pembebasan dari hukuman *kisas* saja sedangkan *diat* menurut keduanya hanya bersifat perdamaian (*Sulh*).

Pada dasarnya di dalam perkara pidana umum korban dan walinya tidak mempunyai wewenang untuk memberikan pengampunan tetapi lainnya halnya dalam pidana *kisas* dan *diat*, korban dan walinya diberi wewenang untuk memberikan pengampunan terhadap pelaku sebagai pengecualian karena tindak pidana ini sangat erat hubungannya dengan pribadi korban, selain itu tindak pidana ini lebih banyak menyentuh pribadi korban dari pada keamanan masyarakat, sehingga pihak korban atau walinya diberikan hak tersebut. Selain itu dalam jarimah hudud pengampunan tidak memiliki pengaruh apapun bagi tindak pidana yang dijatuhi hukuman hudud, baik itu diberikan oleh wali korbannya maupun penguasa. Karena hukuman dalam hudud bersifat wajib dan harus dilaksanakan. Para ulama menyebut tindak pidana hudud sebagai hak Allah sehingga tidak boleh diampuni atau dibatalkan.¹⁹

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika.2005) h. 195.

¹⁹ Abdul Qadir Audah (ed), *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*(Jakarta: PT Kharisma Ilmu,2008), h. 169.

Begitu juga dalam tindak pidana *takzir* sudah disepakati bahwa penguasa memiliki hak pengampunan yang sempurna pada tindak pidana *takzir*. Karena itu penguasa boleh memberi ampunan dan hukumannya baik sebagian maupun keseluruhannya.²⁰ Adapun yang berhak memberikan pengampunan adalah korban itu sendiri apabila ia telah baligh dan berakal. Apabila dia belum baligh dan akalnya tidak sehat menurut madzab Syafi'i dan madzab Hambali, hak itu dimiliki oleh walinya. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, wali dan washi (pemegang wasiat) tidak memiliki hak maaf, melainkan hanya hak untuk mengadakan perdamaian (sulh) saja.²¹

Sanksi pidana dalam hukum Islam disebut dengan *al-'Uqubah* yang berasal dari kata , yaitu sesuatu yang datang setelah yang lainnya, maksudnya adalah bahwa hukuman dapat dikenakan setelah adanya pelanggaran atas ketentuan hukum. *'Uqubah* dapat dikenakan pada setiap orang yang melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain baik dilakukan oleh orang muslim atau yang lainnya.²² Hukuman merupakan suatu cara pembebanan pertanggungjawaban pidana guna memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dengan kata lain, hukuman dijadikan sebagai alat penegak untuk kepentingan masyarakat.²³ Ada tiga bentuk sanksi pidana pembunuhan sengaja menurut hukum pidana Islam, yaitu pertama,

²⁰ Abdul Qadir Audah (ed), *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, h. 171.

²¹ Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. h. 195

²² Abdurrahman I Doi, *Hukum Pidana Menurut Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 6.

²³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), h. 55.

sanksi asli (pokok), berupa hukuman *kisas*, kedua, sanksi pengganti, berupa *diat* dan *takzir*, dan ketiga, sanksi penyerta/tambahan, berupa terhalang memperoleh waris dan wasiat.²⁴

a. Sanksi Asli/Pokok

Sanksi pokok bagi pembunuhan sengaja yang telah dinaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadis adalah *kisas*. *Kisas* dalam arti bahasa adalah **تتبع الاثر** artinya menyelusuri jejak. Selain itu *kisas* dapat diartikan keseimbangan dan kesepadanan. Sedangkan menurut istilah syara, *Kisas* adalah memberikan balasan yang kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati.

Kisas diakui keberadaannya oleh al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' ulama, demikian pula akal memandang bahwa disyari'atkannya *kisas* adalah demi keadilan dan kemaslahatan.²⁵ Hal ini ditegaskan dalam QS al-Baqarah/ 2 : 179



Terjemahnya:

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh.*, VI : 261.

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh.*, VI : 297.

“Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”²⁶

Adapun beberapa syarat yang diperlukan untuk dapat dilaksanakan *kisas* adalah sebagai berikut:

a) Syarat-Syarat Pelaku (Pembunuh)

Menurut Ahmad Wardi Muslich yang mengutip dari Wahbah Zuhailly mengatakan ada syarat yang harus terpenuhi oleh pelaku (pembunuh) untuk diterapkannya hukuman *Kisas*, syarat tersebut adalah pelaku harus mukalaf, yaitu baligh dan berakal, pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja, pelaku (pembunuh) harus orang yang mempunyai kebebasan.²⁷

b) Syarat-syarat bagi yang terbunuh (korban)

Untuk dapat diterapkannya hukuman *kisas* kepada pelaku harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan korban, syarat-syarat tersebut adalah korban harus orang-orang yang *ma'shum ad-dam* artinya korban adalah orang yang dijamin keselamatannya oleh negara Islam, korban bukan bagian dari pelaku, artinya bahwa keduanya tidak ada hubungan bapak dan anak, adanya keseimbangan antara pelaku dengan korban (tetapi para jumhur ulama saling berbeda pendapat dalam keseimbangan ini).

c) Syarat-syarat bagi perbuatannya

Dalam hal perbuatan menurut Hanafiyah mensyaratkan, untuk dapat dikenakan *kisas*, tindak pidana pembunuhan yang dimaksud harus tindak pidana

²⁶ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., h. 44.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 152.

langsung, bukan karena sebab tertentu. Jika tidak langsung maka hanya dikenakan hukuman membayar *diat*. Sedangkan Jumhur tidak mensyaratkan itu, baik pembunuhan langsung atau karena sebab, pelakunya wajib dikenai *kisas*, karena keduanya berakibat sama.²⁸

d) Syarat-syarat bagi wali korban

Menurut Hanafiyah, wali korban yang berhak untuk mengkisas haruslah orang yang diketahui identitasnya. Jika tidak, maka tidak wajib di *kisas*. Karena tujuan dari diwajibkannya *kisas* adalah pengukuhan dari pemenuhan hak. Sedangkan pembunuhan hak dari orang yang tidak diketahui identitasnya akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya.

e) Hal-Hal yang Menggugurkan Hukuman Kisas

Ada beberapa sebab yang dapat menjadikan hukuman itu gugur, tetapi sebab ini tidaklah dapat dijadikan sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan seluruh hukuman, tetapi sebab-sebab tersebut memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap hukuman.²⁹ Adapun sebab-sebab yang dapat menggugurkan hukuman adalah :

- (1) Meninggalnya pelaku tindak pidana,
- (2) Hilangnya tempat melakukan kisas yaitu hilangnya anggota badan atau jiwa orang yang mau di kisas sebelum dilaksanakan hukuman kisas,
- (3) Tobatnya pelaku tindak pidana,

²⁸ Abdul Qodir 'Audah, *at-Tasyri'*, II : 132.

²⁹ Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta; PT. Rineka Cipta, 1993), h. 7.

- (4) Perdamaian ,
- (5) Pengampunan,
- (6) Diwarisnya kisas,
- (7) Kadaluarsa (at-taqadum).

Dari beberapa sebab-sebab yang dapat menggugurkan hukuman yang paling mendekati dengan Remisi adalah sebab yang ke lima yaitu pengampunan.

b. Sanksi Pengganti

1) Diat

Menurut Sayid Sabiq diat adalah harta benda yang wajib ditunaikan karena tindakan kejahatan yang diberikan kepada korban kejahatan atau walinya.³⁰ *Diat* diwajibkan dalam kasus pembunuhan sengaja dimana kehormatan orang yang terbunuh lebih rendah dari pada kehormatan pembunuh, seperti seorang laki-laki merdeka membunuh hamba sahaya. Selain itu *diat* diwajibkan atas pembunuh yang dibantu oleh para *Aqilahnya* (saudara-saudara laki-laki dari pihak ayah), hal ini bilamana pembunuh mempunyai saudara. Ini diwajibkan atas kasus pembunuhan serupa kesengajaan dan pembunuhan karena suatu kesalahan.³¹

³⁰ Sayyid Sabiq (ed.), *Fiqih Sunah*, Diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin Dari " *Fiqhus Sunah*". (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), h.451.

³¹ Sayyid Sabiq (ed.), *Fiqih Sunah*, Diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin Dari " *Fiqhus Sunah*", h. 456.

Dalam hal pembunuhan jenis *jinayatul atraf*, pelaksanaan *diyat* dibagi menjadi dua, yaitu yang dikenakan sepenuhnya dan yang dikenakan hanya setengahnya saja, adapun *diyat* yang dikenakan sepenuhnya adalah dalam hal sebagai berikut.³² :

- (a) Menghilangkan akal,
- (b) Menghilangkan pendengaran dengan menghilangkan kedua telinga,
- (c) Menghilangkan penglihatan dengan membutakan kedua belah mata,
- (d) Menghilangkan suara dengan memotong lidah atau dua buah bibir,
- (e) Menghilangkan penciuman dengan memotong hidung,
- (f) Menghilangkan kemampuan bersenggama atau jima' dengan memotong zakar atau memecahkan dua buah pelir,
- (g) Menghilangkan kemampuan berdiri atau duduk dengan mematahkan tulang punggung.

Sedangkan *diyat* yang dikenakan hanya setengahnya saja adalah dalam hal melukai.³³ Yaitu :

- a) Satu buah mata
- b) Satu daun telinga
- c) Satu buah kaki
- d) Satu buah bibir
- e) Satu buah pantat
- f) Satu buah alis
- g) Satu buah payudara wanita

Jumhur ulama berpendapat bahwa *diyat* pembunuhan sengaja harus dibayar kontan dengan hartanya karena *diyat* merupakan pengganti *kisas*. Jika

³² Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, h. 428.

³³ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, h. 428-429.

kisas dilakukan sekaligus maka *diat* penggantinya juga harus secara kontan dan pemberian tempo pembayaran merupakan suatu keringanan, padahal ‘*amid*.³⁴ pantas dan harus diperberat dengan bukti diwajibkannya ‘*amid* membayar *diat* dengan hartanya sendiri bukan dari ‘*aqilah*, karena keringanan (pemberian tempo) itu hanya berlaku bagi ‘*aqilah*.³⁵

2) Takzir

Takzir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh syara’.³⁶ Dengan kata lain *takzir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim.³⁷

Jenis hukuman yang termasuk jarimah takzir antara lain hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Dalam hukum Islam jenis hukuman yang berkaitan dengan hukuman *takzir* diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia. Menurut Imam Abu Hanifah, pelanggaran ringan yang dilakukan oleh seseorang berulang kali dapat dilakukan atau dapat dijatuhi oleh hakim hukuman mati. Misalnya pencuri yang dimasukkan lembaga permasyarakatan, lalu masih

³⁴ Yaitu orang yang melakukan pembunuhan sengaja

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh*., VI : 307.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*, h.249.

³⁷ Sayyid Sabiq (ed.), *Fiqih Sunah*, Diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin Dari ”*Fiqhus Sunah*”, h. 491.

mengulangi untuk mencuri ketika ia sudah dikenai sanksi hukuman penjara, hakim berwenang menjatuhkan hukuman mati kepadanya.³⁸

c. Sanksi Penyerta/Tambahan

Sanksi ini berupa terhalangnya para pembunuh untuk mendapatkan waris dan wasiat. Ketetapan ini dimaksudkan untuk *sadd az-zara'i*; agar seseorang tidak tamak terhadap harta pewaris sehingga menyegarakannya dengan cara membunuh, selain itu ada juga hukuman lain yaitu membayar *kifarah*, sebagai pertanda bahwa ia telah bertaubat kepada Allah. *Kifarah* tersebut berupa memerdekakan seorang hamba sahaya yang mu'min. Kalau tidak bisa, maka diwajibkan puasa selama dua bulan berturut-turut.

³⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, h.10.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PEMBERIAN REMISI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. Tinjauan Umum Keppres RI No 174 tahun 1999 tentang remisi

Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pemenuhan hak pengurangan masa pidana ini, dapat dilihat pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi dengan adil tanpa adanya diskriminasi yang didasarkan oleh faktor sosial, budaya dan ekonomi apabila yang bersangkutan baik selama menjalani pidana.

Departemen Hukum dan HAM sebagai sistem pemasyarakatan Indonesia, menyelenggarakan sistem pemasyarakatan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya, kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara. Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai Pasal ayat 7 UU.No.12 Tahun 1995, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan sedangkan Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Hak-hak tersebut adalah :

1. Hak untuk melakukan ibadah,
2. Hak untuk mendapat perawatan rohani dan jasmani,
3. Hak pendidikan,
4. Hak Pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak,
5. Hak menyampaikan keluhan,
6. Hak memperoleh informasi,
7. Hak mendapatkan upah atas pekerjaannya,
8. Hak menerima kunjungan,
9. Hak mendapatkan remisi,
10. Hak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk mengunjungi keluarga,
11. Hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat,
12. Hak mendapatkan cuti menjelang bebas,
13. serta hak-hak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹

Di samping hak-hak tersebut, narapidana memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama menjalani masa pidananya di LAPAS, sebagai berikut:

- a. Wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
- b. Wajib menaati peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS.
- c. Mau bekerjasama dengan petugas.

Perlu diingat bahwa hak-hak tersebut tidak diperoleh secara otomatis tetapi dengan syarat atau kriteria tertentu. Sama halnya dengan pemberian remisi. Remisi diberikan karena merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka

¹ Hadi Setia Tunggal, *Undang-undang Pemasyarakatan*, (Jakarta: Haeverindo, 2000), h. 7-8.

mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan, selain itu remisi diberikan karena negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, termasuk setiap narapidana, sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam hal Hak Asasi Manusia. Dalam rangka pelaksanaan hak-hak narapidana, Pemerintah memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki diri selama menjalani hukumannya sehingga diharapkan dapat menyesali dan ketika keluar dari penjara dapat diterima kembali ke tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

Menurut Keppres RI No 174 Tahun 1999 yang berwenang memberikan remisi adalah Menteri Hukum dan HAM. Ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor : M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Keppres RI No 174 Tahun 1999 tentang Remisi pasal 2 yakni :

- (1) Dalam hal pemberian remisi, Menteri dapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Penetapan pemberian Remisi seperti dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri.
- (3) Segera setelah mengeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Kantor Wilayah wajib menyampaikan laporan tentang penetapan pengurangan masa pidana tersebut kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Pemasyarakatan.²

² Keputusan Menteri Hukum No : M.09.HN.02.01 Tahun 1999.

Di Indonesia mempunyai tiga jenis remisi yaitu remisi umum, remisi khusus dan remisi tambahan. Dengan adanya remisi umum dan remisi khusus menurut Keppres RI No 174 tahun 1999 maka menurut penyusun terpidana bisa saja dalam satu tahun dimungkinkan mendapat dua kali remisi, ini karena selain berkelakuan baik remisi umum diberikan setiap tanggal 17 agustus atau hari kemerdekaan negara, dan remisi khusus diberikan setiap hari besar agama yang dianut oleh terpidana sehingga menurut penyusun dengan mendapatkan dua kali remisi maka jelas akan mengurangi hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, dengan demikian putusan hakim yang bersifat tetap dalam pelaksanaannya dapat berubah dengan pemberian remisi ini, menurut penyusun perlu adanya pengetatan pemberian remisi ini agar tidak ada kecemburuan di antara narapidana karena jelas tidak mungkin semua narapidana akan mendapatkan remisi dua kali dalam setahun sehingga gesekan antar narapidana dapat dihindarkan.

Selain dengan adanya kedua remisi tersebut, terdapat juga Remisi Tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dimana narapidana memperoleh Remisi Tambahan apabila Narapidana yang bersangkutan selama menjalani masa pidana:

- a. Berbuat jasa kepada Negara ;
- b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan ;
- c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Perasyarakatan.

Di dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : M.09.Hn.02.01 Tahun 1999 pasal 1 ayat 6 dan 7. Tetapi apakah

demikian kenyataannya, sedangkan ia sendiri masih terbatas ruang geraknya karena hidup di dalam penjara sehingga untuk ikut menanggulangi bencana dirasa tidak mungkin dilakukan diluar penjara. Sehingga menurut penyusun kegiatan-kegiatan kemanusiaan ataupun perbuatan yang bermanfaat bagi Negara yang dilakukan diluar penjara sebaiknya dikhususkan bagi narapidana yang telah menjalani lebih dari dua pertiga masa hukumannya tentunya sudah mendapat predikat berkelakuan baik, sehingga selain berinteraksi dengan dunia luar narapidana diberi kesempatan untuk pencitraan baik bagi dirinya sehingga setelah bebas nanti dapat diterima dikehidupan masyarakat terlebih bagi narapidana kasus pembunuhan yang pada umumnya telah di cap sebagai seorang pembunuh.

Menurut penyusun dengan kewenangan diberikan kepada otoritas birokrasi maka akan dapat dimungkinkan celah untuk melakukan hal-hal yang tak sepatutnya dilakukan oleh para napi dengan pemegang otoritas untuk melakukan suatu kerja sama sehingga mempermudah bagi napi untuk memperoleh remisi dengan jalan penyuapan dan sejumlah harta sebagai timbal balik guna memperoleh remisi. Sehingga perlu adanya pengawasan yang ketat dari pemegang otoritas tertinggi agar tidak terjadi pelanggaran tersebut.

B. Klasifikasi dan Syarat-syarat Pemberian Remisi

Remisi menurut KeppresRI No 174 Tahun 1999 dibagi menjadi tiga (3) yaitu:³

³ Keputusan Presiden RI No 174 Tahun 1999

- a. Remisi umum yaitu Remisi yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
 - b. Remisi khusus yaitu Remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.
 - c. Remisi tambahan yaitu Remisi yang diberikan apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
1. a. Besarnya remisi umum adalah :
- 1) 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan ; dan
 - 2) 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
- b. Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut :
- 1) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas;
 - 2) Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (bulan);
 - 3) Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;

4) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan

5) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) setiap tahun

c. Syarat mendapatkan remisi umum adalah :

1) Warga Binaan Pemasyarakatan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas

2) Warga Binaan Pemasyarakatan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda.

3) Warga Binaan Pemasyarakatan tidak sedang menjalani hukuman mati atau seumur hidup.

4) Sudah menjalani lebih dari 6 (enam) bulan.

5) Tidak dikenakan hukuman disiplin.

2. a. Besarnya remisi khusus adalah:

1) 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan

2) 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

b. Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut:

1) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksudkan dalam angka 1 tersebut di atas;

Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1(satu) bulan;

- 2) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
- 3) Pada tahun keenam dan seterusnya remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

c. Syarat mendapatkan remisi khusus adalah sebagai berikut :

- 1) Warga Binaan Pemasyarakatan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas.
- 2) Warga Binaan Pemasyarakatan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda.
- 3) Warga Binaan Pemasyarakatan tidak sedang menjalani hukuman mati atau seumur hidup.
- 4) Sudah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- 5) Tidak dikenakan hukuman disiplin.

3. a. Besarnya remisi tambahan adalah :

- 1) $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada Negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan; dan
- 2) $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Pembinaan di Lapas sebagai pemuka.

b. Remisi tambahan tidak diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana, yang :

- 1) Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
- 2) Dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib;
- 3) Lapas dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;
- 4) Sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; atau
- 5) Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda.

c. Syarat mendapatkan remisi tambahan adalah sebagai berikut :

- 1) Warga Binaan Pemasyarakatan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas.
- 2) Warga Binaan Pemasyarakatan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda.
- 3) Warga Binaan Pemasyarakatan tidak sedang menjalani hukuman mati atau seumur hidup.
- 4) Sudah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- 5) Tidak dikenakan hukuman disiplin.

Melihat kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap narapidana ataupun anak pidana maka kriteria yang paling jelas yaitu Narapidana ataupun Anak Pidana tersebut telah menjalani hukuman minimal enam bulan. Dengan demikian bagi Narapidana yang dijatuhi hukuman dibawah enam bulan tentu tidak akan pernah mendapatkan remisi. Tentu jika dilihat dari segi keadilan dirasa kurang karena sama-sama menjalani hukuman tetapi tidak mendapat remisi. Sehingga menurut penyusun seharusnya perlu adanya peraturan khusus bagi Narapidana maupun Anak Pidana

yang mendapat hukuman dibawah enam bulan seperti halnya tidak diletakkan di dalam penjara tetapi diletakkan di tempat yang memberikan pelatihan keterampilan seperti halnya balai latihan kerja tetapi tetap harus mendapat pengawasan dari pihak yang berwenang.

Dari hal tersebut, adanya batas minimum hukuman bagi Narapidana atau Anak Pidana untuk mendapatkan remisi yaitu sudah menjalani hukuman minimal enam bulan penjara. Jadi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang mendapat hukuman dibawah enam bulan tidak akan mendapatkan remisi. Di dalam Keppres RI No 174 Tahun 1999 tidak mengkhususkan pemberian remisi kepada tindak pidana pembunuhan semata, tetapi pasal-pasal yang terkandung dalam Keppres ini menjelaskan remisi untuk semua tindak pidana umum termasuk di dalamnya adalah tindak pidana pembunuhan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pasal-pasal tentang pembunuhan, sanksi yang diancamkan minimal empat tahun (pasal 345 dan 346 KUHP) dan maksimal hukuman mati atau seumur hidup (pasal 339 dan 340 KUHP) sehingga dengan demikian sudah jelas bahwa setiap Narapidana atau Anak Pidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan pasti mendapat remisi jika dilihat dari lamanya hukuman yang dijalani yakni lebih dari enam bulan penjara asalkan ia berkelakuan baik selama menjalani hukumannya. Tetapi, di dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor : M.09.Hn.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 174 tahun 1999 Tentang Remisi terutama pada pasal 1 ayat 5 yang berbunyi : ”

Narapidana yang berkelakuan baik ialah Narapidana yang mentaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi.”⁴ Menurut penyusun perbuatan baik itu mempunyai makna yang luas, karena bisa saja perbuatan baik itu ditafsirkan berbuat baik kepada kalapas atau sipir-sipir penjara yang tiap hari bersinggungan sehingga muncul celah untuk melakukan hal-hal yang curang seperti penyuapan kepada petugas agar ia mendapatkan remisi. Tentu ini bukanlah perbuatan yang bisa disebut berkelakuan baik untuk benar-benar mendapat remisi. Sehingga perlu adanya spesifikasi berkelakuan baik dan jika perlu bagi terpidana yang tertangkap melakukan kerja sama dengan petugas harus diberi sanksi berupa penambahan masa hukuman sehingga dia benar-benar jera. Termasuk sanksi kepada aparat yang bersangkutan bila perlu diberhentikan secara tidak hormat karena telah membantu seseorang yang telah bersalah dan sedang menjalani hukuman.

B. Analisis Hukum Pidana Islam

Dalam Islam pengampunan merupakan salah satu faktor pengurangan hukuman (remisi), baik diberikan oleh korban atau walinya atau penguasa Negara. Pengampunan atau syafaat juga diartikan sebagai keringanan atau dihapuskannya dosa bagi orang-orang yang telah melakukan kesalahan di dunia juga syafaat berarti keluarnya orang-orang yang berdosa besar dari neraka suatu saat kelak. Pengaruh pengampunan hanya berlaku pada hukuman atau jarimah kisas, diat, takzir. Hukuman

⁴ Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : M.09.Hn.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 174 Tahun 1999 Tentang Remisi

lain bagi jarimah kisas diat seperti kifarat tidak bisa dimaafkan olehnya. Sehingga pengampunannya tidak dihapuskan oleh hak penguasa negara untuk menjatuhkan hukuman takzir.⁵

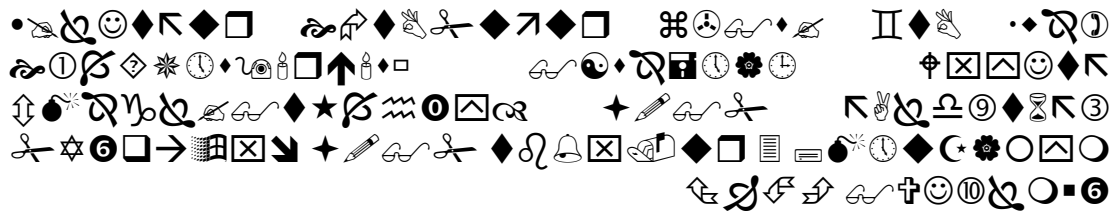
Remisi diberikan karena Narapidana dinilai berbuat baik dan menyesali perbuatannya, ini juga sejalan dengan tujuan syara' yaitu menghindarkan umat manusia dari kerusakan dan keburukan karena selama menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan Narapidana diberi bimbingan maupun pelatihan dan lain-lain dengan maksud agar ia tidak mengulangi dan juga mau menyesali perbuatannya yang telah dilakukan sebelumnya sehingga muncul rasa tobat, ini juga menandakan adanya perlindungan jiwa sebagai salah satu tujuan penetapan hukum yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Selain itu penyusun juga belum menemukan hukum syara' yang menolak tentang penerapan remisi ini.

Perlu dicermati mengenai subjek pemberi ampunan yaitu Presiden, dan terpidana harus mengajukan sendiri, lain halnya dengan remisi yang mana merupakan pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dengan pengawasan Kalapas dan dengan persetujuan Menteri Hukum dan HAM. Dengan kata lain, remisi ini diberikan karena terpidana dinilai telah melakukan perbuatan yang baik selama menjalani hukumannya dan menyesali perbuatan yang dilakukannya. Remisi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan maka di dalam al-Qur'an pun telah dijelaskan tentang anjuran untuk memberikan ampunan

⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1967), h. 348.

kepada pelaku tindak pidana pembunuhan yang diancam dengan hukuman kisas, hal ini sesuai dengan firman Alla SWT dalam QS. al-Baqarah/2: 178 dan QS. al-Maidah/4: 45 yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Selain itu demi mengimplementasikan bahwa pelaku benar-benar menyesali maka Allah swt. menyuruh untuk bertobat bagi orang-orang yang telah melakukan kezaliman, artinya orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat agama, karena Allah swt. mau memberikan ampunan kepada orang-orang yang benar-benar menyadari dan menyesali atas apa yang mereka perbuat. Hal ini sesuai firman Allah swt. dalam QS Al Furqaan/ 25 : 70



Terjemahannya:

“Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁶

Islam mewajibkan keadilan dan mengharamkan kedzaliman. Ajaran-ajaran dan nilainya yang luhur dalam bentuk cinta kasih, tolong menolong, keutamaan, pengorbanan kepentingan sendiri dapat menciptakan kelembutan hidup dan mendekatkan hati serta mempersaudarakan sesama manusia. Kemudian Islam menghargai akal pikiran manusia serta menjadikan keduanya sebagai sarana untuk

⁶ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*., h. 569.

saling memahami dan mengerti. Islam menitik beratkan kepada perdamaian antara sesama manusia, saling menghormati saling menghargai dan saling memaafkan, sebab yang disebut benar yang mutlak itu hanya Allah yang punya, manusia hanya kebenaran saja, dan benar menurut sendiri belum tentu benar menurut pandangan orang lain. Oleh karena itu, menurut pandangan hukum yang berlaku di masyarakat dan menurut hukum sudah ditetapkan oleh Negara. Apabila yang benar dan yang salah belum ditetapkan oleh Undang-undang maka kebenaran dan kesalahan masih bersifat subyektif, oleh karenanya Undang-undang dan hukum masyarakat perlu mengaturnya, demi kebaikan dan ketentraman manusia bermasyarakat dan bernegara.

Pemaafan atau perdamaian dalam pandangan hukum Islam, merupakan hukuman juga. Dimana pelaku tindak pidana sebelumnya harus minta maaf dan menyesali atas perbuatannya yang telah merugikan korban. Hal ini memberikan pelajaran bahwa pelaku tindak pidana harus mengakui segala kesalahannya terlebih dahulu, sementara untuk mengakui kesalahan adalah suatu yang berat, sebab pada dasarnya manusia selalu merasa benar terus apa yang dilakukannya, padahal hukum mengaturnya dan menyatakan bahwa perbuatannya salah. Oleh karena itu, untuk mengakui bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah salah memang berat apalagi yang dimintai maafnya adalah bukan siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa, dalam pandangan-Nya semuanya sama, didepan Yang Maha Kuasa sama-sama mahluk yang diciptakan-Nya, disini ada pelajaran kejujuran, dan lapang dada mengakui atas kesalahan, sedangkan korban atau keluarganya untuk memaafkan orang yang sudah

menyakitinya itu pun berat, ini pelajaran untuk berlapang dada menerima kenyataan dan ujian hidupnya. Pemaafan diberikan sesudah terjadinya perdamaian dan kebersihan hati mau saling memaafkan dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pemberian maaf oleh korban, atau wali dianjurkan oleh al-Qur'an, dan akan diberi pahala di akhirat serta keridhoan Tuhan dan syariat Islam memandang pengampunan/pemaafan tersebut sebagai rahmat dari Tuhan atas manusia

Hukum pidana Islam menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan memeberikan rasa keadilan yang seimbang dengan menempatkan keluarga korban sebagai unsur penentu dalam menjatuhkan hukuman pidana mati terhadap pelaku pidana pembunuhan. Penjatuhan hukuman mati atau dibebaskan dari hukuman mati didasarkan pada etekad baik keluarga korban.

Hukuman bagi pelaku pembunuhan dalam hukum pidana Islam terbagi dalam tiga jenis, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan adalah *kisas* dan bila dimaafkan oleh wali korban maka hukuman penggantinya adalah *diat*. Jika sanksi kisas dan *diat* dimaafkan maka hukuman penggantinya adalah *takzir*. Hukuman tambahan bagi jarimah ini adalah terhalangnya hak atas warisan dan wasiat.⁷

Dalam Keppres RI No 174 tahun 1999 terutama dalam pasal 1 disebutkan bahwa “setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara

⁷ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), h. 37.

dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana” Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh al-Ghazali, bahwa orang yang bertaubat dikatakan sempurna bila ia tidak hanya menyesali perbuatannya saja, tetapi ia harus mengikuti dan mengganti perbuatan tersebut dengan perbuatan baik.⁸ Kriteria syarat tersebut secara umum sejalan dan erat hubungannya dengan salah satu prinsip hukuman dalam hukum pidana Islam, dimana hukuman adalah sebagai upaya pencegahan, media mendidik dan pengajaran, upaya menimbulkan efek jera.

Tabel Pemberian Remisi Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

| Pemberian Remisi dalam Hukum Nasional | Pemberian Remisi dalam Hukum Islam |
|---|---|
| Pelaku Lebih Dahulu Menjalani Hukuman | Pelaku Tidak Menjalani Hukuman |
| Setelah Memenuhi Syarat-Syarat yang Telah Ditentukan Dalam PP | Setelah Bertaubat dengan Sungguh-sungguh |
| Perkara Sudah Diputus Oleh Hakim | Perkara Sebelum/Sesudah Sampai Kepada Hakim/ULil Amri |
| Diberikan Oleh Menteri Hukum dan Ham | Diberikan Oleh Hakim/ULil Amri dan Atau Juga Pihak Korban |

Dari keterangan-keterangan tersebut, tampak bahwa syarat atau kriteria pokok dari pemberian pengurangan hukuman (remisi) di Indonesia (dalam Hukum Pidana Nasional) pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok hukum

⁸ Al-Ghazali, *Taubat, Sabar dan Syukur*, alih bahasa Nur Hikmah dan RHA Suminta (Jakarta:Tinta Mas, 1983), h. 22.

pidana dalam Islam. Hal ini dapat kita cermati dari kriteria atau syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku, yakni, berbuat baik selama di dalam tahanan, menyesalinya dan berniat untuk tidak mengulangnya lagi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah penyusun kemukakan mengenai remisi di Indonesia serta remisi dalam perspektif hukum Islam, maka sampailah penyusun pada bagian kesimpulan skripsi ini. Kesimpulan penyusun dapat dikemukakan sebagai berikut :

Maksud dan tujuan dari pemberian remisi di Indonesia merupakan sebagai motivator atau stimulant untuk berkelakuan baik, untuk mengurangi dampak negatif dari hukuman yang dijatuhkan. Dalam hukum pidana Islam pengurangan hukuman (remisi) bertujuan untuk kemaslahatan (mengurangi dampak negatif) serta sebagai apresiasi sebagai taubat (penyesalan) dan azam untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Hak atas remisi di Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi adalah diperuntukkan bagi narapidana yang memenuhi syarat-syarat menuju kebaikan dalam arti bertaubat. Dalam ajaran Islam kelakuan baik merupakan manifestasi dari sifat dan wujud penyempurnaan diri rasa penyesalan seseorang atas perbuatan masa lalunya atau perbuatan jahat yang telah ia lakukan, dan juga sebagai wujud dari penyempurnaan taubat seseorang, dan kriteria yang diperuntukkan bagi narapidana yang mendapatkan remisi member pandangan bahwa narapidana tersebut ada rasa penyesalan dan indikasi bertaubat. Kriteria tersebut juga secara umum sejalan dan

erat hubungannya dengan salah satu prinsip hukuman dalam pidana Islam, dimana hukuman adalah sebagai pencegahan (*ar-rad-u waz-zajru*) media pendidik dan pengajaran (*al-Islam al-Tahzib*)

Pelaksana remisi di Indonesia menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi , pada dasarnya tidak lepas dari prinsip-prinsip pokok hukum pidana Islam. Akan tetapi hal ini terdapat sedikit perbedaan yakni dalam hukum pidana Islam pengurangan hukuman dapat diberikan sebelum atau sesudah putusan hakim (vonis).

Konsep hukuman dalam hukum pidana Islam yang berpangkal kepada kemaslahatan dan media pendidikan serta pengajaran. Demikian pula dengan masalah pengampunan, sekiranya pengampunan tersebut berfungsi sebagai upaya menghargai hak-hak Narapidana, maka di sinilah justru mencakup tujuan syari'at yang paling utama adalah prinsip kemaslahatan. Sehingga upaya menjaga ketertiban dan ketentraman dapat tercapai dan tidak terabaikan. Prinsip kemaslahatan inilah yang menjadi tujuan utama adanya remisi di Indonesia. Dan hal tersebut sejalan dengan pokok-pokok ajaran syari'at Islam, dimana segala peraturan-peraturan yang disyari'atkan pada Islam hakekatnya bermuara pada prinsip kemaslahatan tersebut. Adanya peraturan yang berupa perintah dan larangan dalam syari'at Islam dimaksudkan agar kemaslahatan hidup manusia menjadi terjaga dan terlindungi , terutama kemaslahatan di dunia dan akhirat.

B. Saran-saran

Berdasarkan pada pembahasan kesimpulan tersebut, maka penyusun perlu memberikan saran-saran yang berkaitan dengan masalah pengurangan menjalani hukuman (remisi) sebagai berikut:

1. Dalam menentukan kriteria berkelakuan baik seyogyanya dilihat secara menyeluruh. Upaya tersebut dapat berupa pemantauan terhadap narapidana yang mendapatkan hak remisi tersebut berada ditengah-tengah masyarakat akan merubah segala perbuatannya ke jalan yang benar.
2. Perlu adanya penyederhanaan prosedur dalam proses pengajuan remisi tanpa mengurangi maksud dan tujuan dari remisi itu sendiri. Lembaga pemasyarakatan sebenarnya mempunyai tujuan yang baik tetapi akan lebih baik lagi jika aparat yang berada didalamnya mempunyai dedikasi untuk benar-benar menegakkan dan memberikan pembinaan yang baik pula sehingga tidak ada lagi narapidana yang bisa keluar jalan-jalan dengan cara menyogok aparat terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam/Editor*, diterjemahkan oleh Muhammad,Ahsin Sakho Dari” *At Tasri Al Fiqh Al Jian’I ”*. Jakarta: PT Kharisma Ilmu. 2008.
- Al- Zuhaili, Wahbah. *Al-Qur’an al-Karim, Bunyatuh al-Tasyri’iyyah wa Khasa’isuh al-Hadariyyah*. Terj. Mohamad Luqman Hakiem dan Mohammad Fuad Hariri, *Al-Qur’an: Paradigma Hukum dan Peradaban*. Surabaya: Risalah Gusti. 1996.
- Al-Mawardi, Abu Al-Hasan, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. Mesir: Mustafa Al-Babyi Al-Halaby, cet. Ke-3. 1975.
- Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 2009.
- *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Departeman Agama RI, *Al Qur’an Dan Terjemahannya*. Semarang : Cv Asy Syifa’. 2000.
- Departeman Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta : Lubuk Agung. 1989.
- Djamali, Abdul, *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung : Cv Mandar Maju. 1997.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Raja GrafindoPersada. 1997.
- Doi, A Rahman I,Syariah the Islamic Law. Terj.Zainuddin dan Rusydi Sulaiman,Hudud dan Kewarisan (syariah II). Cet. I; Jakarta : PT RjaGrafindo Persada. 1996.
- Erwin, Rudy T. dan J.T.Prasetyo, *Himpunan Undang-undang dan Peraturanperaturan Hukum Pidana*. Jilid I. Jakarta : Aksara Baru. 1980.
- Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung : Alumni. 1992.
- Hamzah, Andi ,*Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta ; Rineka Cipta. 1991.
- , *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Inonesia. 1986.

- , *KUHP Dan KUHPA*. Jakarta ; Rineka Cipta. 2006.
- , *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Halim, Andreas, *Kamus Lengkap 10 Milyar*. Surabaya : Sulita Jaya. 1999.
- Hanafi, Ahmad , *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta:PT Bulan Bintang. 1993.
- Kasdi, Abdurrahman Dan Umma Farida , *Tafsir Ayat-Ayat Yaa Ayyuhal-Ladziina Aamanuu I*. Jakarta : Pustaka Al Kautsar. 2005.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
- Keputusan Presiden republik Indonesia , Peraturan Pemerintah RI No 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan, pasal 1.
- Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.09.Hn.02.01 Tahun 1999 *Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 174 Tahun 1999 Tentang Remisi*.
- Lamintang ,P.A.F., *Delik-delik Khusus*. cet. 1. Bandung: Bina Cipta. 1986.
- *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : Armico. 1988.
- Marpaung, Leden, *Asas,Teori, Praktek, Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Grafika.2007.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta; PT Bumi Aksara. 2007.
- *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara. 2003.
- *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara. 2004.
- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir*, cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Progresif. 1992.
- Muslich, Ahmad Wardi , *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 2005.

- *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Jakarta : Sinar Grafika. 2006.
- Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. cet.5. Jakarta: Balai Pustaka. 1982.
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2006.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta : Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan. 1992.
- Sabiq ,Sayyid (ed.), *Fiqih Sunah*, Diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin Dari ”*Fiqhus Sunah*”. Jakarta : Pena Pundi Aksara. 2006.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*. Jakarta : Gema Insani Press. 2003.
- Shihab, M. Quraishi, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Quran*. Jakarta : Lentera Hati. 2002.
- Soedarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta : Rhineka Cipta. 1992.
- , *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta; PT. Rineka Cipta. 1993.
- Suma, Muhammad Amin. *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek, dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2001.
- Suparni,Ninik, *Eksistensi Pidana Denda dalam Pidana dan Pemidanaan*,ed. Ke-1. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 2005.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 174 TAHUN 1999

TENTANG

REMISI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. bahwa remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan;
2. bahwa negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, termasuk setiap Narapidana;
3. bahwa ketentuan mengenai remisi sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) perlu disesuaikan dengan hak dan kewajiban setiap Narapidana sebagai pemeluk agama karena agama merupakan sendi utama kehidupan masyarakat;
4. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pengaturan mengenai remisi ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Remisi.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3846).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG REMISI

Pasal 1

1. Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.
2. Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.
3. Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 2

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. remisi umum, yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus; dan

- b. remisi khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Pasal 3

1. Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:
 - a. berbuat jasa kepada negara;
 - b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
 - c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai berbuat jasa dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau bagi kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Besarnya remisi umum adalah:
 - a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan

- b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (duabelas) bulan atau lebih.

(2) Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- b. pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
- c. pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
- d. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
- e. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam bulan) setiap tahun.

Pasal 5

(1) Besarnya remisi khusus adalah:

- a. 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6. (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- b. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

(2) Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1)
- b. pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
- c. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan

- d. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

Pasal 6

Besarnya remisi tambahan adalah:

- a. $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
- b. $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka.

Pasal 7

- (1) Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
- (2) Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal masa penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung dari sejak penahanan yang terakhir.

- (4) Untuk penghitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, 1 (satu) bulan dihitung sama dengan 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Penghitungan besarnya remisi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada agama Narapidana dan Anak Pidana yang pertama kali tercatat dalam buku register Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Narapidana dan Anak Pidana pada suatu tahun tidak memperoleh remisi, besarnya remisi pada tahun berikutnya didasarkan pada remisi terakhir yang diperolehnya.
- (2) Penghitungan remisi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan Pengadilan secara berturut-turut dilakukan dengan cara menggabungkan semua putusan pidananya.
- (3) Pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tidak diperhitungkan didalam penggabungan putusan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 9

- (1) Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

- (3) Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan oleh Narapidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal pidana penjara seumur hidup telah diubah menjadi pidana penjara sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka untuk pemberian remisi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 6.

Pasal 11

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 juga diberikan kepada:

- a. Narapidana dan Anak Pidana yang mengajukan permohonan grasi sambil menjalankan pidananya; dan
- b. Narapidana dan Anak Pidana Warga Negara Asing.

Pasal 12

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang:

- a. dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
- b. dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;

- c. sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; atau
- d. dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Pasal 13

- (1) Usul remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundangundangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Perundangundangan.
- (2) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tentang remisi diberitahukan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan.
- (3) Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak Pidana, Menteri Hukum dan Perundang-undangan mengkonsultasikannya dengan Menteri Agama.

Pasal 14

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dicatat di dalam daftar tersendiri.

Pasal 15

Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 23 Desember 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd,

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 23 Desember 1999

SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

ALIRAHMAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 223

RIWAYAT HIDUP



SULASTRY AMIN, lahir di Kabupaten Sinjai, 07 September 1992 merupakan anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Muh. Amin B, S.Sos dengan Ibu Liswati Noor S.Pd. Jenjang pendidikannya ditempuh mulai dari Tk Pertiwi X, pada tahun 1998 menginjak Sekolah Dasar di SDN 2 Kabupaten Sinjai, Selanjutnya pada tahun 2004 melanjutkan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Kabupaten Sinjai, lalu kemudian melanjutkan pada jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Kabupaten Sinjai hingga lulus tahun 2010. Setelah lulus dari SMA, ia melanjutkan pada jenjang Strata satu (S1) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (HPK). Pada jenjang tersebut disamping aktifitas kuliah, penyusun juga aktif beberapa organisasi diantaranya sebagai pengurus Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) DPC. Makassar Periode 2011-2012, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).